

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104  
TAHUN 2007 TENTANG PENYEDIAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3KILOGRAM BAGI RUMAH  
TANGGA DAN USAHA MIKRO DI KELURAHAN SUNGAI  
LAKAM BARAT KABUPATEN KARIMUN**

**Roli Sambuardi**

Dosen Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Universitas Karimun

Email: [rolis4mbuardi@gmail.com](mailto:rolis4mbuardi@gmail.com)

**Deska Zulkarnain**

Dosen Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Universitas Karimun

Email: [deskaalhaqi@gmail.com](mailto:deskaalhaqi@gmail.com)

**Muhammad Taufiq Razali**

Dosen Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Universitas Karimun

Email: [taufiqrazali09@gmail.com](mailto:taufiqrazali09@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari penyediaan dan pendistribusian gas Lpg 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan wawancara, kuesioner dan observasi. Lokasi penelitian di Kelurahan Sungai Lakam Barat. Dalam melihat bagaimana implementasi peraturan presiden nomor 104 tahun 2007 yang dilaksanakan, peneliti menggunakan teori-teori yang dikembangkan oleh George C Edward III. Dalam penelitian implementasi yang akan dilihat adalah pada aspek penyediaan dan pendistribusian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan dan pendistribusian gas Lpg 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat sudah berjalan cukup baik.. Penelitian ini melihat Implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh empat variable. Dimana empat variable kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Setelah diadakan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun telah berjalan cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan atau hambatan dalam proses pengimplementasian.

**Kata Kunci** : Implementasi, Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007, Kelurahan Sungai Lakam Barat

## **I. Pendahuluan**

Dalam penyediaan dan pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas ) 3 kilogram Kelurahan Sungai Lakam Barat telah menyalurkan paket tabung gas LPG ukuran 3 kilogram secara tepat sasaran kepada masyarakat penerima golongan ekonomi rendah dan usaha mikro yang telah direncanakan dan dijadualkan. Kelurahan Sungai Lakam Barat pun sangat membantu masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi rumah tangganya dan di usaha mikro. Kebutuhan itu digunakan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga dan usaha mikro khususnya pada bahan bakar untuk memasak didalam rumah tangganya.

Kelurahan Sungai Lakam Barat telah merealisasikan tugas pemerintah yang diberikan kepada PT Pertamina (Persero) pada umumnya dan kepada unit gas domestik pada khususnya dan telah melaksanakan salah satu program pemerintah perihal penerapan kebijaksanaan pengalihan subsidi minyak tanah ke LPG yang akan mengurangi konsumsi minyak tanah sehingga mengurangi subsidi BBM.

Dengan adanya Program konversi penggunaan minyak tanah ke LPG untuk rumah tangga golongan ekonomi rendah dan usaha mikro merupakan program yang telah dicanagkan oleh pemerintah. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram bagi rumah tangga dan usaha mikro dalam mengurangi konsumsi minyak tanah sehingga mengurangi subsidi BBM. Bahan bakar sendiri memiliki jenis bermacam-macam diantaranya minyak bumi dan gas alam. Bahan bakar minyak bumi dijadikan bensin, solar dan minyak tanah. Sedangkan gas alam dijadikan LPG (Liquefied Petroleum Gas). LPG merupakan bahan bakar berupa gas yang dicairkan (Liquified Petroleum Gasses) dan merupakan produk minyak bumi yang ramah lingkungan dan banyak digunakan oleh rumah tangga dan usaha mikro. Saat penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat yang dilakukan oleh PT. Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat untuk membagi paket tabung gas LPG ukuran 3 kilogram secara tepat sasaran kepada masyarakat

penerima golongan ekonomi rendah dan usaha mikro yang telah direncanakan dan dijadualakan.

Selama tujuh bulan Kelurahan Sungai Lakam Barat membagikan gas LPG 3 kilogram yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juli 2019 dan pembagian tersebut diadakan secara bergiliran menurut RT masing – masing. Saat pembagian gas LPG 3 kilogram diberikan oleh pihak Kelurahan disaksikan langsung oleh Lurah dan pihak Pertamina dan disaat itulah pihak Pertamina melakukan sosialisasi atau mengajarkan langsung tata cara penggunaan gas LPG 3 kilogram yang benar dan aman kepada masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Barat supaya masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Barat mengerti dan paham cara menggunakan gas LPG 3 kilogram baik di rumah tangganya dan di tempat usaha mikronya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa distribusi adalah penyaluran atau pengaturan kepemilikan barang atau unsur produksi kepada orang banyak (masyarakat). Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pertamina dengan brand elpiji, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (kilang BBM) dan kilang gas yang komponen utamanya adalah gas propane ( $C_3H_{12}$ ) dan butane ( $C_4H_{10}$ ) lebih kurang 99% dan selebihnya adalah gas pentane ( $C_5H_{12}$ ) yang dicairkan.

Penyediaan dan pendistribusian gas LPG ukuran 3 kilogram adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat penerima golongan ekonomi rendah agar mereka mendapatkan gas LPG 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangganya dan di usaha mikronya. Program konversi penggunaan minyak tanah ke gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat penerima golongan ekonomi rendah di rumah tangga dan usaha mikro yang telah direncanakan dan dijadualakan khususnya untuk kebutuhan bahan bakar yang lebih hemat.

Tujuan dari penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram ini yaitu melaksanakan salah satu program pemerintah perihal penerapan kebijaksanaan pengalihan subsidi minyak tanah ke LPG yang akan mengurangi konsumsi minyak tanah sehingga mengurangi subsidi BBM. Program gas LPG 3 kilogram ini merupakan program nasional yang bertujuan

untuk menghemat subsidi minyak tanah. Program tersebut diharapkan bisa menghemat subsidi mencapai Rp 23 triliun / tahun untuk nasional dan Rp 300 miliar/ tahun untuk provinsi riau jika terlaksana dengan baik.

Dikelurahan Sungai Lakam Barat dalam penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan menggunakan gas LPG ukuran 3 kilogram dalam rumah tangganya dikarenakan ketakutan masyarakat akan terjadinya bocornya tabung gas dan mengalami peledakan hal ini disebabkan ruginya sebagian masyarakat yang tidak datang pada hari pertama saat pembagian gas pada hal saat diberikan gas LPG 3 kilogram mereka ditunjukkan atau diajarkan oleh pihak pertamina cara memasang gas dan menggunakan gas dengan benar dan aman sehingga masyarakat tidak ragu lagi menggunakannya sebagai bahan baku untuk memasak.

Dalam pendistribusian pemberian paket perdana tabung gas LPG 3 kilogram tidak menggunakan agen tetapi langsung mendistribusikan ke kelurahan dan diletakkan didalam ruko untuk sementara sebelum dibagikan secara langsung ke masyarakat karena pada saat gas masuk untuk pertama kali dikelurahan Sungai Lakam Barat belum ada agen. Agen ada setelah gas diterima masyarakat dan setelah gas habis atau kosong baru ada agen untuk melakukan pengisian ulang ke SPBE (Stasiun pengisian bulk elpiji) dan untuk pengisian gas LPG 3 kilogram Kelurahan Sungai Lakam Barat di Tanjungban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Kelurahan Sungai Lakam Barat merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Karimun. Dalam bidang pemerintahan, Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun merupakan salah satu kelurahan yang mendukung dan membantu pemerintah pusat menjalankan programnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan memberikan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pendistribusian secara gratis gas LPG 3 kg. Di Kelurahan Sungai Lakam Barat mempunyai 3 RW dan 18 RT.

Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun menunjukkan bahwa pengajuan bantuan gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat sejak tahun 2016 akan tetapi tidak terlaksanakan karena perlu adanya proses perubahan data dari tahun ketahun dengan jumlah penduduk semakin bertambah sehingga masih banyak lagi yang perlu penyesuaian data dari tahun 2016 ke tahun 2018 dan terealisasikan pada januari 2019.

Kelurahan Sungai Lakam Barat memiliki 3,358 kartu keluarga dan yang mendaftar gas LPG 3 kilogram sekitar 2000 dan yang mendapatkan gas LPG 3 kilogram yaitu sekitar 1.631 kartu keluarga (KK) dan terealisasi pada bulan januari 2019. Sedangkan syarat untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram secara gratis yaitu kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) yang berada di Kelurahan Sungai Lakam Barat sebagai identitas diri. Rumah tangga dan usaha mikro yang mendaftar ialah rumah tangga dan usaha mikro yang tidak mempunyai gas LPG 3 kilogram dan menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangganya maupun diusaha mikronya dan tidak mempunyai kompor gas LPG 3 kilogram termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

## **II. Tinjauan pustaka**

### **a. Implementasi Kebijakan**

Implementasi Kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses Kebijakan setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna Pelaksanaan Undang- Undang di mana berbagai aktor organisasi, Prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan Kebijakan dalam upaya untuk meraih Tujuan –tujuan Kebijakan atau Program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu Keluaran (*output*) maupun sebagai suatu Dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian Keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak Implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, Undang-Undang publik, Dan keputusan Yudisial. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warga Negara merasakan lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya, dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan Sosial atau Kebijakan pemberantasan kejahatan. Singkatnya, implementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses , suatu keluaran, dan

Suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan Teknik-teknik pengendalian.

Implementasi Kebijakan pada perinsipnya adalah cara agar sebuah Kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang .Untuk Mengimplementasikan Kebijakan Publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi . Rangkaian implementasi kebijakan dapat di amati dengan jelas yaitu mulai dari program ,ke proyek ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim manajemen, khususnya Manajemen Sektor Publik, kebijakan di turunkan berupa program program yang kemudian di turunkan menjadi proyek-proyek dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang di lakukan oleh pemerintah, Masyarakat maupun kerja sama Pemerintah dengan Masyarakat.

Menurut Gardon dalam Pasalong (2016:58) bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan inplementasi yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan dan peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Implementasi suatu kebijakan, Menurut Ripley dan Franklin (Agustino, 2010) adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, Kebijakan, Keuntungan (*benefit*), Atau suatu jenis keluaran yang nyata ( *tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat Pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para Birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan

**b. Sumberdaya**

Sumberdaya implementasi kebijakan adalah bahwa sumberdaya kebijakan sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa Sumberdaya Kebijakan yang telah di rumuskan mungkin hanya menjadi

rencana saja dan tidak akan pernah terealisasi. Indikator-indikator yang ada dalam sumberdaya adalah:

1. **Sumberdaya Manusia;** yaitu Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf/pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak memadai, Mencukupi ataupun Tidak kompeten dibidangnya.
2. **Sumberdaya Anggaran;** terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.
3. **Sumberdaya Peralatan (Fasilitas);** Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi sarana dan prasarana kantor yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
4. **Sumberdaya Kewenangan;** Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya

**c. Disposisi**

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa; jika implementasi

kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. **Pengangkatan birokrasi.** Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. **Insentif** merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi

**d. Striktur Birokrasi**

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.



6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi". Menurut Winarno (2005:150), "*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar

### **III. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (arikunto, 2002:136). Untuk mengetahui Implementasi peraturan presiden nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram bagi rumah tangga dan usaha mikro di Kelurahan Sungai Lakam Barat. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan dimaksud sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Sugiyono (2017 : 8), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi obyek penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah atau natural setting.

### **IV. Pembahasan**

Dari seluruh data yang telah disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik secara koesioner, wawancara serta melalui observasi terhadap fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan implementasi program gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat, maka akan dilakukan hasil penelitian terhadap setiap data yang ada dan fakta yang didapat melalui interpretasi dan penguraian masalah yang terjadi.

#### **a. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas LPG 3 kilogram bagi rumah tangga dan usaha mikro untuk golongan masyarakat ekonomi rendah (Miskin)**

Implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan implementasi penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun, ia menjadi suatu proses yang dinamis yang kemudian mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada penempatan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram ini ke dalam tujuan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan bagi masyarakat golongan ekonomi rendah (miskin) berupa gas LPG 3 kilogram yang cukup berkualitas untuk bahan bakar memasak guna memenuhi kebutuhan memasak dalam rangka mengurangi konsumsi minyak tanah sehingga mengurangi subsidi BBM dalam rumah

tangga dan usaha mikro. Sehingga implementasi penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram ini pada akhirnya berhasil mencapai tujuan utama kebijakan itu sendiri.

### **1. Penyediaan**

Penyediaan tabung LPG 3 kilogram dilakukan oleh Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Manusia) dan dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) menugaskan kepada PT. Sehat Pratama Sehati sebagai pelaksana pendistribusian program pemerintah yang ditugaskan untuk memberi secara langsung ke Kelurahan Sungai Lakam Barat melalui pendistribusian dan disalurkan kemasyarakat secara langsung. Penugasan penyediaan dan pendistribusian dapat dilakukan melalui penunjukan langsung atau lelang.

### **2. Pendistribusian**

Dalam hal pendistribusian paket LPG 3 kilogram bersubsidi dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) menugaskan kepada PT Sehat Pratama Sejati sebagai pelaksana pendistribusian yang mendapatkan penugasan untuk mendistribusikan LPG tabung 3 kilogram ke Kelurahan Sungai Lakam Barat. Tata cara pendistribusian paket LPG 3 kilogram bersubsidi sebagai berikut :

- a. Dibagikan secara gratis sebagai paket perdana tabung gas LPG 3 kilogram kompor beserta aksesorisnya kepada masyarakat pengguna minyak tanah. Pemilihan masyarakat penerima paket LPG bersubsidi didasarkan pada survey dan sensus ke rumah tangga untuk mendapatkan data yang dilaksanakan oleh RT setempat menurut syaratnya yaitu memiliki bukti kependudukan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk setempat, pengguna minyak tanah dan tidak memiliki kompor LPG.
- b. Kepada masyarakat penerima diberikan prosedur atau petunjuk tata cara penggunaan tabung dan kompor gas LPG pada saat pembagian gas tersebut.

Dan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun maka dapat dilihat dari beberapa faktor berikut ini :

### **3. Komunikasi**

Menurut Edward III dalam widodo (2010 :97) komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo

(2010:97) persyaratan pertama perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini tabel kuesioner tentang pengetahuan masyarakat mengenai maksud dan tujuan program gas LPG 3 kilogram.

**Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Mengenai Maksud dan Tujuan Program Konversi Mitan ke Gas LPG 3 kg**

<b>NO</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat tahu	6	72,5%
2	Tahu	29	15%
3	Kurang tahu	5	12,5%
4	Tidak tahu	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kuesioner 2020**

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden mengetahui maksud dan tujuan dari program gas LPG 3 kilogram yakni sebanyak 6 (72,5%) sangat tahu, 29 (15%) menyatakan tahu dan 5 (12,5%) menyatakan kurang tahu maksud dan tujuan program gas LPG ini dan tidak tahu tidak ada yang menjawab.

*"Untuk komunikasi yang pertama kali diadakan Sosialisasi tingkat kabupaten yang dihadiri oleh Bupati Karimun , Kabid Energi dan Sumber Daya Mineral dan dilakukan oleh Team Gasdom Pertamina, pendataan ESDM dan PT. Sehat Pratama Sejati. Di tingkat Kecamatan sudah dilakukan oleh Team PT. Sehat Pratama Sejati. Sedangkan di tingkat Kelurahan dilakukan oleh Supervisor PT. Sehat Pratama Sejati dengan membawa surat ijin dan dilampiri surat ijin ke Kecamatan dan surat pemberitahuan dari Pertamina ke Bupati. Di tingkat Kabupaten rakor biasanya dilakukan pada awal pelaksanaan program yang sekaligus digunakan untuk membicarakan pembagian gas LPG 3 kg di Kelurahan/Desa dan sebagai laporan akhir yang merupakan kesimpulan pelaksanaan pekerjaan. Dan laporan akhir disertai dengan database seluruh warga penerima paket tabung,kompur dan asesorisnya "*

Pihak kelurahan :

"kami selalu mendapatkan informasi dari pihak kecamatan dan informasi yang kami dapatkan kami sampaikan kepada masyarakat. Setiap ada informasi yakni mengenai masyarakat yang tidak terdaftar sebagai sasaran penerima paket gas LPG dan akan dilakukan daftar ulang untuk mendapatkannya untuk tahap selanjutnya tetapi tidak tahu kapan datangnya maka akan kami informasikan kepada masyarakat"

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pihak kelurahan menyatakan bahwa penelitian dari faktor transmisi atau penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kelurahan Sungai Lakam Barat secara langsung kepada pihak terkait dapat disimpulkan bahwa persiapan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 sudah berjalan cukup baik.

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik sering kali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian, salah penyampaian dari masyarakat serta dipengaruhi oleh media komunikasi seperti televisi yang disebabkan banyaknya tingkat birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi ditengah jalan.

Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa komunikasi dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 dalam penelitian ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan George C Edward III bahwa komunikasi harus jelas dan konsisten sehingga dapat berjalan efektif. Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan faktor komunikasi dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung.

**Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Mengetahui fungsi dari kartu pelanggan yang diberikan sebelum mendapatkan gas LPG 3 kilogram**

<b>NO</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat tahu	7	23,3%
2	Tahu	23	76,7%
3	Kurang tahu	-	-
4	Tidak tahu	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kuesioner 2020**

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden mengetahui fungsi dari kartu pelanggan yang diberikan oleh kelurahan sebelum mendapatkan gas Lpg 3 kilogram yakni sebanyak 23 (76,7 %) menyatakan tahu, sangat tahu 7 (23,3%), kurang tahu dan tidak tahu tidak menjawab.

Wawancara penulis dengan ibuk Endang istri dari bapak zainal abidin warga telaga riau RT 002 RW 006 ia menyatakan fungsi kartu pelanggan digunakan saat pengambilan paket gas Lpg 3 kilogram tiap kartu keluarga penerima pasti dapat karna ada nomor urut sesuai daftar penerima paket dan ditanda tangani warga dan digunakan untuk kontrol pengisian ulang dipangkalan.

### **b. Sumber Daya**

Di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumber daya, yang dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Tanpa adanya sumber daya manusia kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja (Subarsono, 2005:91)

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Mengimplementasikan kebijakan dengan cermat, jelas dan konsisten tidaklah cukup untuk menghasilkan implementasi yang efektif tanpa di dukung oleh sumber daya. Sehingga dapat dikatakan sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi agar dapat berjalan efektif. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi gas LPG 3 kilogram ini adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud disini yakni sumber daya manusia yang langsung terlibat dalam penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram serta penentuan rumah tangga dan usaha mikro yaitu aparat kelurahan selaku pihak yang memberi kartu pelanggan dan gas LPG dari pertamina kepada masyarakat dan RT dan pihak kelurahan yang mendata dan menentukan masyarakat yang berhak menjadi sasaran pemberian gas LPG 3 kilogram ini. Untuk sumber daya finansial ini sendiri yakni ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk gas bersubsidi ini, karena apabila tidak ada anggaran dari pemerintah maka kebijakan itu tidak dapat dilaksanakan. Maka program gas LPG 3 kilogram ini tidak akan berjalan lancar.

Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai sumber daya yang berkaitan langsung dengan masyarakat dalam proses implementasi program Gas LPG 3 kg ini, maka penulis akan menampilkan distribusi

jawaban responden berdasarkan hasil kuesioner. Adapaun distribusi jawaban yang akan ditampilkan pada bagian ini yaitu mengenai kemampuan aparat kelurahan Sungai Lakam Barat dalam melaksanakan program pendistribusian gas LPG 3 kg, mengenai pelayanan aparat kelurahan Sungai Lakam Barat pada saat pemberian kartu pelanggan dan saat penyaluran Gas LPG 3 kg. Berikut adalah tabel distribusi jawaban responden.

**Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Kemampuan Aparat Kelurahan Sungai Lakam Barat Dalam Melaksanakan Program Pendistribusian Gas LPG 3 kg**

<b>NO</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat Baik	8	20%
2	Baik	32	80%
3	Kurang Baik	-	-
4	Tidak baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kuesioner 2020**

Dari Tabel diatas dapat dilihat jawaban responden mengenai kemampuan aparat kelurahan Sungai Lakam Barat dalam melaksanakan program konversi mitan ke gas LPG 3 kilogram, sebanyak 8 orang (20%) mereka sangat baik dalam melaksanakannya dan 32 orang (80%) menyatakan Baik, kurang baik dan tidak baik tidak ada yang menjawab. Dari data diatas menunjukkan bahwa aparat Kelurahan Sungai Lakam Barat baik dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam melaksanakan program pendistribusian konversi mitan ke gas LPG 3 kilogram ini.

**Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi jawaban Responden Mengenai Pelayanan Aparat Kelurahan Sungai Lakam Barat saat pemberian kartu pelanggan dan penyaluran gas LPG 3 kg kepada masyarakat**

<b>NO</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat Baik	13	32,5%
2	Baik	27	67,5%
3	Kurang Baik	-	-
4	Tidak baik	-	-

<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>
---------------	-----------	-------------

**Sumber : Kuesioner 2020**

Dari tabel di atas dilihat jawaban responden mengenai pelayanan aparat kelurahan sungai lakam barat saat pemberian kartu pelanggan dan penyaluran gas Lpg 3 kilogram, sebanyak 27 orang (67,5%) menyatakan baik dalam memberi pelayanan dan 13 orang (32,5%) menyatakan sangat baik. Yang menyatakan kurang baik tidak ada dan tidak baik tidak ada.

**Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi jawaban Responden Mengenai kepuasan Terhadap kompor satu tungku, selang dan regulator yang diberikan pihak kelurahan**

<b>NO</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat puas	4	10%
2	Puas	36	90%
3	Kurang puas	-	-
4	Tidak puas	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kuesioner 2020**

Dari tabel di atas dilihat jawaban responden mengenai kepuasan terhadap peralatan aksesorisnya yang diberikan oleh pihak kelurahan sebanyak 4 (10%) menyatakan sangat puas, 36 (90%) menyatakan sangat puas, kurang puas dan tidak puas tidak ada yang menjawab.

**Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi jawaban Responden Tentang Memperoleh Gas LPG 3 kilogram lebih mudah dari minyak tanah**

<b>NO</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat mudah	10	25%
2	Mudah	30	75%
3	Kurang mudah	-	-
4	Tidak mudah	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kuesioner 2020**

Dari tabel di atas dilihat jawaban responden tentang memperoleh gas LPG 3 kilogram lebih mudah dari minyak tanah yang menyatakan sangat mudah sebanyak 10 (25%), menyatakan mudah 30 (75%), kurang puas dan tidak puas tidak ada yang menjawab.



**Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi jawaban Responden Mengenai Jarak warung yang menjual gas LPG 3 kilogram**

<b>NO</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat dekat	6	15%
2	Dekat	34	85%
3	Kurang dekat	-	-
4	Tidak dekat	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kuesioner 2020**

Dari tabel di atas dilihat jawaban responden mengenai jarak warung yang menjual gas LPG 3 kilogram sebanyak 6 (15%) menyatakan sangat dekat, 34 (85%) dekat dan kurang dekat dan tidak dekat tidak ada yang menjawab.

Dari semua jawaban informan mengenai kemampuan aparat Kelurahan Sungai Lakam Barat dalam melaksanakan program pendistribusian gas LPG 3 kilogram, mengenai pelayanan aparat Kelurahan Sungai Lakam Barat saat pemberian kartu pelanggan dan penyaluran gas LPG 3 kilogram kepada masyarakat, mengenai kepuasan kompor satu tungku dan aksesoris yang diberikan pihak kelurahan, memperoleh gas LPG 3 kilogram lebih mudah dari minyak tanah dan mengenai jarak warung yang menjual gas LPG 3 kilogram. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa faktor sumberdaya manusia dalam penelitian ini dapat dikatakan sudah cukup baik.

## **2. Sumber Daya Anggaran**

Anggaran merupakan komponen yang sangat utama bagi terselenggaranya suatu program. Anggaran yang memadai pasti akan menunjang keberlangsungan program tersebut. Sumber Daya Finansial yaitu merupakan dana yang disediakan pemerintah untuk program konversi penggunaan minyak tanah ke gas LPG 3 kilogram ini. Berdasarkan tinjauan dokumen dan hasil wawancara dengan Kepala Lurah Sungai Lakam Barat, dana program konversi penggunaan minyak tanah ke gas LPG 3 kg berasal dari APBN untuk program ini dan ini adalah tahun pertama bagi program gas LPG 3 kilogram ini sampai dengan di titik serah yang telah disepakati bersama dengan pemerintahan Kelurahan/Desa. Berikut tabel distribusi jawaban responden mengenai jumlah yang mendapatkan gas LPG 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro tanpa dipungut biaya atau gratis. Setiap

pengambilan gas LPG 3 kg mereka mendapatkan secara gratis dari kelurahan tanpa dikenakan biaya sedikitpun.

**Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Jumlah Yang Mendapatkan Gas LPG 3 Kg Untuk Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Tanpa Dikenakan Biaya (Gratis)**

<b>NO</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Ada	-	-
2	Tidak ada	40	100%
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kuesioner 2020**

Dari tabel diatas dapat dilihat seluruh responden yakni sebanyak 40 orang (100%) menyatakan bahwa tidak ada dikenakan biaya dalam pemberian gas LPG 3 kg ini. Setiap pengambilan gas LPG 3 kg mereka mendapatkan secara gratis dari kelurahan tanpa dikenakan biaya sedikitpun.

Wawancara penulis dengan ibuk Lurah Sungai Lakam Barat , ia mengatakan bahwa saat pembagian gas LPG 3 kg tidak ada dikenakan biaya sedikitpun hanya saja mereka membawa kartu keluarga tempat tinggalnya, kartu tanda penduduk dan kartu pelanggan yang berwarna hijau sebagai syarat untuk pengambilan gas LPG 3 kg di Kelurahan Sungai Lakam Barat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibuk Lurah Sungai Lakam Barat di atas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya anggaran di Kelurahan Sungai Lakam Barat sudah memadai untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007, dimana hal ini terlihat sampai saat ini Kelurahan Sungai Lakam Barat masih tetap mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani pembagian gas LPG 3 kilogram. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa faktor sumberdaya anggaran dalam penelitian ini dapat dikatakan sudah cukup baik.

### **3. Sumber Daya Peralatan**

Fasilitas/peralatan termasuk faktor yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya lainnya dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah, transportasi, dan peralatan pembantu akan menunjang implementasi suatu kebijakan. Dengan adanya fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan kebijakan.

**Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Mengenai tempat penyimpanan gas LPG 3 kilogram sebelum diberikan kepada masyarakat**

<b>NO</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat tahu	5	12,5%
2	Tahu	35	87,5%
3	Kurang tahu	-	-
4	Tidak tahu	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kuesioner 2020**

Dari tabel di atas dilihat jawaban responden mengenai tempat penyediaan gas LPG 3 kilogram sebanyak 5 (12,5%) menyatakan sangat tahu, tahu (87,5%) kurang tahu dan tidak tahu tidak ada yang menjawab.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibuk Hasna RT 02 RW 01 jalan perjuangan mengatakan tempat penyimpanan gas LPG 3 kilogram diletakkan dikantor lurah sebelum dibagikan kepada rumah tangga dan usaha mikro.

Dari wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa tempat penyimpanan gas LPG 3 kilogram tidak menjamin keselamatan warga sekitar selain tempatnya hanya ruko yang kecil tidak memudahkan dalam memberikan pelayanan karena masyarakat yang mengambil gas LPG 3 kilogram terlalu ramai apalagi pada hari pertama yang langsung diajarkan menggunakan gas LPG 3 kilogram oleh PT. Sehat Pratama Sehati selaku perusahaan yang mendistribusikannya dan ruko kantor lurah yang mudah terbakar dan tidak mempunyai ventilasi udara menyebabkan bisa terjadinya kebakaran yang disebabkan gas LPG 3 kilogram karena tempat penyimpanannya tidak sesuai dengan standar gudang dari pertamina.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa fasilitas untuk melaksanakan tempat penyediaan gas LPG 3 kilogram tidak memadai dan tidak menjamin keselamatan. Fasilitas yang dimaksud tidak memadai untuk menunjang keberhasilan implementasi peraturan presiden nomor 104 tahun 2007 seperti kepemilikan gedung untuk mendukung kegiatan pelayanan publik/*stakeholder*. Fasilitas yang lainnya yang tidak memadai yakni fasilitas untuk pengangkutan gas LPG 3 kilogram di kantor Lurah seperti kendaraan roda empat yaitu truck yang masih layak jalan dibuktikan dengan dokumen kendaraan dan umur kendaraan maksimal 10 tahun dan tidak memakai truck

milik agen gas LPG 12 kilogram karena akan mengganggu pekerjaan agen gas LPG 12 kilogram. Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan factor sumberdaya dalam penelitian ini tentang implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat.

#### **4. Sumber daya Kewenangan**

Selanjutnya kewenangan, dimana menurut Edward III dalam Agustino (2012:152) wewenang pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implemendor di mata publik tidak legitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya atau demi kepentingan kelompoknya.

PT. Sehat Pratama Sehati merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak dalam bidang Infrastuktur dan Konsultan Research dan Management. Dalam program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kilogram PT. Sehat Pratama Sehati melaksanakan program konversinya diwilayah gas domestik region I tahun 2018 di Provinsi Kepulauan Riau telah mendapat kewenangan. Didalam penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram yaitu PT. Sehat Pratama Sehati sebagai badan usaha yang menjalankan tugasnya tentunya harus mempunyai surat izin usaha dan syarat-syaratnya. Akan tetapi PT. Sehat Pratama Sejati dalam mendistribusikan tugasnya mendapatkan tender dari PT.Pertamina dalam waktu yang tidak lama hanya datang untuk mendistribusikan gas. Sedangkan untuk izin usaha dan syarat-syaratnya yang mengetahui hanya PT. Sehat Pratama Sejati dengan PT. Pertamina saja. Untuk izin uasaha yang di dinas perizinan dan penanaman modal hanya perusahaan yang bersal dari karimun saja sedangkan PT. Sehat Pratama Sejati yaitu perusahaan yang berasal dari luar dan tidak mempunyai cabang dikarimun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bpk Martin selaku Kasi di Dinas Disperindak bagian energi sumber daya mineral bahwa PT. Sehat Pratama Sejati hanya mendapatkan tender dari Pertamina karena tugas PT. Sehat Pratama Sejati hanya membagikan atau mendistribusikan jumlah gas LPG 3 kilogram di titik serah yang telah disepakati. Dengan demikian peneliti menganalisis dan membuat kesimpulan bahwa PT. Sehat Pratama Sejati secara legitimasi sudah memiliki kewenangan yang saat ini berjalan sudah cukup baik, sehingga lembaga ini dinilai peneliti sudah memadai untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007.

### **c. Disposisi (Sikap/Kecenderungan)**

Disposisi implementor merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Di dalam pelaksanaan satu kebijakan suatu kecenderungan yang dimiliki oleh implementor terkadang bisa menjadi penghambat sehingga kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik. Kecenderungan yang dimaksud di sini ialah karakteristik implementor seperti kemauan, kejujuran, komitmen, tidak pilih kasih dan demokratis, tanggung jawab, keikhlasan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Pada bagian ini penulis menyajikan jawaban responden tentang kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki implementor yang dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan aparat Kelurahan Sungai Lakam Barat selaku implementor yang langsung berhubungan dengan masyarakat penerima gas LPG 3 kilogram.

Menurut hasil penelitian dan pengamatan penulis bahwa pada saat penyaluran gas LPG 3 kilogram, pihak kelurahan segera melayani dengan cepat dan baik. Asalkan masyarakat telah memenuhi persyaratan untuk mengambil gas LPG 3 kilogram tersebut yakni dengan membawa kartu pelanggan yang telah dibagikan kepada masyarakat penerima gas LPG3 kilogram, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sebagai penerima gas LPG 3 kilogram. Berikut ini tabel kuesioner mengenai kecukupan gas LPG untuk memenuhi kebutuhan selama satu bulan.

### **Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Kecukupan Gas LPG sebesar 3 kilogram untuk memenuhi kebutuhan selama satu bulan**

<b>NO</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat mencukup	-	-
2	Cukup	6	15%
3	Kurang cukup	34	85%
4	Tidak cukup	-	
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kuesioner 2020**

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden mengenai kecukupan gas LPG 3 kilogram yang diberikan kepada penerima gas sebesar 3 kilogram dalam pemenuhan kebutuhan selama satu bulan, sebanyak 34 (85%) menyatakan kurang cukup, 6 (15%) menyatakan cukup, sangat cukup dan tidak cukup tidak ada yang menjawab.

**Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Mengenai Program konversi Gas LPG 3 kilogram dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan usaha mikro penerima gas LPG 3 kilogram**

<b>NO</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat membantu	-	-
2	Membantu	7	17,5%
3	Kurang membantu	33	82,5%
4	Tidak membantu	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kuesioner 2020**

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden mengenai gas LPG 3 kilogram dapat membantu mengurangi beban pengeluaran dirumah tangga sebagai bahan bakar untuk memasak sebanyak menyatakan sangat membantu tidak menjawab, membantu (17,5%), 33 (82,5%) menyatakan kurang membantu, tidak membantu tidak ada yang menjawab. Responden mengatakan gas LPG 3 kilogram kurang membantu beban pengeluaran rumah tangga karena gas LPG 3 kilogram kurang cukup untuk satu bulan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa mengenai kurang cukup gas LPG 3 kilogram untuk memenuhi kebutuhan selama satu bulan dan mengenai program konversi Gas LPG 3 kilogram kurang membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan usaha mikro. Penjelasan di atas menjadi keterangan bahwa disposisi termasuk dalam faktor penghambat

dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Gas LPG 3 Kilogram Bagi Rumah Tangga Dan Usaha Mikro di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam penyelenggaraan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Gas LPG 3 Kilogram Bagi Rumah Tangga Dan Usaha Mikro di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward, yaitu prosedur –prosedur kerja atau ukuran-ukuran dasar yang sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi atau pembagian wewenang (Winarno, 2014:206).

Faktor *pertama Standar Operasional Prosedur* (SOP); adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerja implementor.

Harapan dengan adanya SOP, sumber daya pengampu kebijakan mampu untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sedangkan struktur organisasi pelaksana sejauh mungkin menghindari hal-hal yang berbelit, panjang dan kompleks.

Setiap organisasi pemerintah maupun swasta bagaimanapun bentuk dan apapun jenisnya, membutuhkan sebuah panduan/sistem untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit kerja organisasi. SOP merupakan suatu sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan. Pada hakekatnya sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik,

menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mempermudah koordinasi yang lebih baik antara bagian-bagian/bidang yang berlainan dalam organisasi.

Faktor *Kedua* Struktur Organisasi; merupakan gambaran pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya struktur tersebut maka kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan. Struktur Organisasi mencerminkan hubungan antar komponen dan posisi yang ada di dalamnya, dan semua komponen tersebut mengalami saling ketergantungan. Artinya, masing-masing komponen di dalamnya akan saling mempengaruhi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keseluruhan kegiatan organisasi.

Struktur organisasi secara jelas mampu memisahkan tanggung jawab dan wewenang pegawai. Jika dalam suatu organisasi tidak memiliki komponen penting dalam struktur organisasi tersebut bisa jadi akan mengalami gangguan kedepannya, salah satunya akan berpengaruh pada alur manajemen dan pengelolaan.

Struktur birokrasi yang terdiri dari pembagian kerja dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dari bagan hubungan kerja gas LPG 3 kilogram dimana Kelurahan Sungai Lakam Barat mempunyai kaitannya dengan PT. Sehat Pratama Sejati atau perusahaan dimana dalam penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram dimana masyarakat mendaftar untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram dengan kelurahan baik di rumah tangga maupun di usaha mikro karena kelurahanlah yang lebih mengetahui mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan Kelurahan pun mempunyai data calon penerima paket perdana gas LPG 3 kilogram. Dimana proses pendataan petugas PT. Sehat Pratama Sejati atau perusahaan akan bekerja sama dengan aparat pemerintah Kelurahan / Desa untuk mengecek kebenaran data calon penerima paket perdana yang diterima dari konsultan pendataan dan verifikasi dari Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral).

Dengan ditetapkannya struktur organisasi akan memperjelas sekaligus memisahkan tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing bidang/bagian dalam melaksanakan pekerjaannya dari awal sampai akhir dalam suatu sistem (*Standar Operasional Prosedur /SOP*) yang mampu mengatur arus kerja dan hasil kerja menjadi lebih baik disamping



memudahkan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram serta koordinasi dari masing-masing bidang/bagian.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat yang dilihat dari fragmentasi dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) sudah dapat dijalankan dengan cukup baik, sehingga dalam penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa struktur birokrasi termasuk dalam faktor pendukung dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas LPG 3 kilogram Bagi Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun. Dengan demikian kinerja PT. Sehat Pratama Sejati dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang ada sudah dapat dilaksanakan dengan cukup baik.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram yang dilihat dari fragmentasi dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) sudah dapat dijalankan dengan cukup baik, sehingga dalam penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa struktur birokrasi termasuk dalam faktor pendukung dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat.

## **V. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas LPG 3 kilogram Bagi Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kelurahan Sungai Lakam Barat, dapat disimpulkan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1.** Faktor komunikasi yang sudah berjalan cukup baik antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kelurahan saling berkoordinasi satu dengan yang lain sehingga memiliki pemahaman yang sama mengenai penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram bagi rumah tangga dan usaha mikro.
- 2.** Faktor sumber daya yang mendukung implementasi penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram juga baik dari segi sumber daya manusia telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. sehingga menjadi faktor pendorong di dalam penelitian ini.

3. Disposisi implementor merupakan kemauan atau keinginan dan para pelaksana (implementors) belum terpenuhi dengan baik. Sehingga faktor disposisi merupakan salah satu faktor penghambat dalam penelitian Implementasi Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian gas LPG 3 kilogram ini.
4. Struktur birokrasi yang berhubungan dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) berkaitan dengan pelaksanaan operasional PT. Sehat Pratama Sejati sebagai perusahaan atau badan usaha sudah memiliki Struktur Organisasi dimana dalam bagan hubungan kerja gas LPG 3 kilogram sehingga pembagian wewenang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sudah cukup baik walaupun dibagian bagan hubungan kerja gas LPG 3 kilogram tidak masuk Kelurahan Sungai Lakam Barat didalam strukturnya akan tetapi dalam metodologi pekerjaan PT. Sehat Pratama Sejati sebagai konsultan pendistribusian melakukan kerja dengan cara mengantar ke titik serah yang telah disepakati dengan pihak Kelurahan/Desa sesuai dengan jumlahnya dan diselesai dengan tepat waktu. Sehingga dalam penelitian Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pendistribusian sebagai faktor pendukung.
5. Secara keseluruhan dari hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pendistribusian gas LPG 3 kilogram bagi rumah tangga dan usaha mikro sudah berjalan cukup baik, dilihat dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, Namun demikian dirasakan masih ada sedikit kekurangan-kekurangan disana sini, diantaranya dari sumber daya peralatan dan disposisi (kemauan atau keinginan para pelaksana (implementors) belum terpenuhi dengan baik.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku-Buku**

Agustino, Ripley dan Franklin.2010. *Administrasi publik : Teori dan Aplikasi*, Bandung : PT. Refika Aditama

Tahir, Gunn dan Hoogwood. 2014:15 . *Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Pasalong, Gardon. 2016:58. *Implementasi Kebijakan public dan Implementasinya* , Jakarta, PT . Bumi Aksara

Mulyadi, Wahyu. 2015:50 . *Analisis Implementasi Kebijaksanaan* . Jakarta : Bumi Aksara

Kapioru, 2014:105. *Implementasi kebijakan memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah*. Bandung: Alfabeta

Van meter dan Van Horn, Said Zainal. 2011. *Implementasi kebijakan publik AIPI : Bandung*

George C. Edwards III, Budi Winarno. 2016. *Implementasi kebijakan dan konsekuensi- konsekuensi kebijakan*

Gridle. Mulyadi.2015:47. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tahir. Salusu.2014. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Juknis Sehati. 2018. *Laporan Akhir pekerjaan pendistribusian paket perdana tabung lpg 3 kg, kompor beserta aksesorisnya*, Provinsi Kepulauan Riau

Mazmanian.2010. *Responsivitas dan Akuntabilitas Sektor Publik* , Bintang Media , Jakarta

Pratama. Syaukani dkk. 2015:229. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Model Implementasi Kebijaksanaan Publi*. Bumi Aksara: Jakarta

Taufik dan Israil. Lister 2013:136: *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Grafindo Persada : Jakarta